

**LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN  
PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH  
JAKARTA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKj ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi lain penyusunan LKj ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023–2026. Dalam penyusunan LKj ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga penyajian LKj Badan Penghubung Pemerintah Aceh ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 31 Januari 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PEMERINTAH ACEH

**AKKAR ARAFAT, S.STP., M.SI.**  
Pembina  
NIP. 19850619 200312 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Data Umum Organisasi .....	1
C.    Struktur Organisasi .....	2
D.    Sistematika Penyajian .....	4
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
A.    Rencana Strategis tahun 2023-2026.....	6
B.    Indikator Kinerja Utama.....	7
C.    Penetapan Kinerja tahun 2023 .....	7
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.    Capaian Kinerja .....	9
B.    Realisasi Anggaran .....	11
<b>BAB IV    PENUTUPAN .....</b>	<b>15</b>
A.    Kesimpulan .....	15
B.    Saran .....	15
LAMPIRAN I .....	16
LAMPIRAN II .....	17

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Capaian Kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 1 sasaran strategis yang telah dilaksanakan dengan baik. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1 indikator kinerja utama. Capaian Kinerja Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk tahun 2023 adalah 100%, sedangkan laporan realisasi keuangan sebesar 99,62%.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan yaitu program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah, dan Program Pengembangan Data Informasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta, 31 Januari 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
Pemerintah Aceh  
  
**AKKAR ARAFAT, S.STP., M.SI.**  
Pembina  
NIP. 19850619 200312 1 001

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Peran utama Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta.

Permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur. Permasalahan ini menjadi perhatian utamakarena terkait dengan peran utama Badan Peghubung Pemerintah Aceh sebagai instansi yang mengedepankan pelayanan dalam pelaksanaan tupoksi. Pelayanan merupakan indikator utama Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja instansi. Perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas kelembagaan, tatalaksana, sumber daya aparatur serta sarana prasarana pendukung perlu selalu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

## **B. Data Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan perwakilan negara asing di Jakarta;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai struktur organisasi yang disusun untuk mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Hal tersebut diimplementasikan dalam susunan organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang terdiri atas:

#### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

#### **b. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian adalah unsur pembantu Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang undangan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset Pemerintah Aceh di pulau Jawa;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja.

#### **c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat**

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang hubungan antar lembaga instansi Pemerintah/Swasta

dan masyarakat mukim. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Pelaksana penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat.

#### **d. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi**

Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu Pemerintah Aceh.

Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi :

- Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
- Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi.

#### **e. Seksi Promosi dan Pameran**

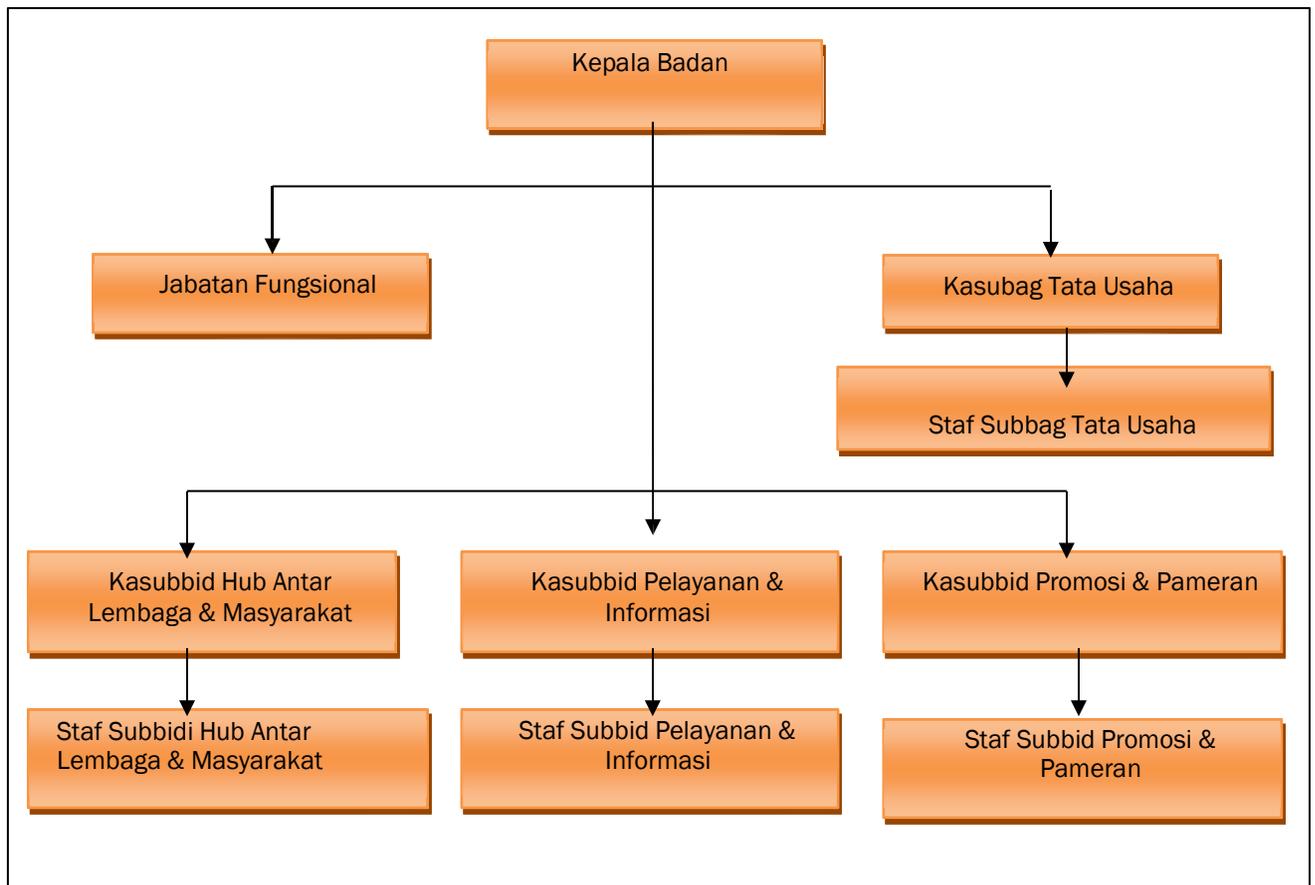
Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran.

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh**



#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan penekanan kepada aspek strategis (*strategic issued*) yang sedang di hadapi.

##### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

##### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan tentang Capaian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

#### **Bab IV PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program

##### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah dengan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.

##### **2. Sasaran**

Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

##### **3. Program**

Pada tahun 2023 Badan Penghubung Pemerintah Aceh melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

#### **B. Indikator Kinerja Utama**

Penyusunan Indikator Utama merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang kemudian digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai instansi yang mempunyai fungsi utama dalam Pelayanan dan Promosi Aceh di Jakarta juga menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBERDATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang puas terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh}}{\text{Jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$	Menggunakan aplikasi dengan perangkat elektronik	1. Subbidang Pelayanan dan Informasi 2. Subbidang Hubungan Lembaga dan Masyarakat

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026. Penetapan kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh 2023**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	75 %

Program

Anggaran

1 Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Rp 5.724.224.518,-

Banda Aceh, 2023

Pj. GUBERNUR ACEH,

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PEMERINTAH ACEH,




ACHMAD MARZUKI

AKKAR ARAFAT, S.STP. M.Si

Tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan kinerja menyajikan informasi-informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target dan program, serta jumlah anggaran yang di rencanakan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh diukur dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

### A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Pengukuran capaian Penetapan Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN/ REALISASI (%)
1	2	3	4		5		6
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	75	%	75	%	100%

Total keseluruhan capaian Penetapan Kinerja tahun anggaran 2023 rata-rata **100%**.

Target kinerja untuk *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPPA* tercapai 100%, hal ini didukung oleh keseluruhan pelayanan seperti pemulangan jenazah masyarakat Aceh dan masyarakat yang terlantar di Jabodetabek serta pengelolaan rumah singgah bagi masyarakat yang sedang dalam pengobatan di Jakarta dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 3.2 Perbandingan % Capaian/Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022 dan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% Capaian/Realisasi		KETERANGAN
			2022	2023	
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	100%	100%	Pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 dan 2023 tetap sama

Pada tabel diatas capaian/realisasi terhadap sasaran strategis untuk tahun 2023 dan tahun 2022 tetap sama target yang di tetapkan berhasil dicapai yaitu 100%.

Capaian kinerja untuk sasaran diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023 Sasaran Strategis**

SASARAN STRATEGIS						
Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik						
Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target		Realisasi		%
<b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
Jumlah masyarakat yang dilayani BPPA	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	125	org	143	org	114%

Untuk meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik dengan target indikator kinerja persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA mencapai realisasi 100%. Sasaran strategis ini dilakukan melalui *Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*, program tersebut adalah *Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat* dengan capaian 100%, kegiatannya berupa pemulangan warga Aceh yang terlantar dan pemulangan jenazah.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 Badan Penghubung Pemerintah Aceh didukung anggaran sebesar Rp. **36.294.372.798,-** yang bersumber dari APBA. Jumlah realisasi penarikan dana Rp. **36.158.008.413,-** atau sebesar 99,62%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 jumlah realisasi anggaran tahun 2023 meningkat sekitar 2,62% seperti yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dengan Tahun 2023**

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2022	<b>43.910.494.770</b>	<b>42.595.211.282</b>	1.315.283.488	97,00
2	2023	<b>36.294.372.798</b>	<b>36.158.008.413</b>	136.364.385	99,62
	<i>Selisih</i>	<i>7.616.121.972</i>	<i>6.437.202.869</i>	<i>1.178.919.103</i>	<i>2,62</i>

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2,62% dibanding dengan tahun anggaran 2022 disebabkan pada tahun 2023 kegiatan dapat terlaksana lebih baik.

Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan program dan kegiatan untuk tahun 2023 pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Tabel Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>36.294.372.798</b>	<b>36.158.008.413</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>9.594.338.331</b>	<b>9.593.319.580</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>36.294.372.798</b>	<b>36.158.008.413</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>30.468.486.862</b>	<b>30.433.783.895</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.790.000</b>	<b>91.790.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	91.790.000	91.790.000	100	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.594.338.331</b>	<b>9.593.319.580</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.656.899.331	5.655.880.580	99,98	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.937.439.000	3.937.439.000	100	100
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>398.700.000</b>	<b>398.700.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	398.700.000	398.700.000	100	100
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.531.615.245</b>	<b>6.523.871.076</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	209.430.500	209.430.500	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.325.580	155.319.000	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	696.077.015	696.062.015	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.902.303.085	2.896.053.085	99,78	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.564.065	102.564.065	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	31.125.000	31.055.800	99,78	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.434.790.000	2.433.386.611	99,94	100
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.313.610.000</b>	<b>3.297.596.900</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.880.990.000	2.865.000.000	99,44	100
	Pengadaan Mebel	169.753.000	169.729.900	99,99	100

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262.867.000	262.867.000	100	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.401.872.208</b>	<b>3.392.009.382</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	553.680.242	553.680.242	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.785.558.002	1.775.695.176	99,45	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.275.000	119.275.000	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	943.358.964	943.358.964	100	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.136.561.078</b>	<b>7.136.496.957</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.533.131.553	3.533.087.432	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.499.174.430	2.499.174.430	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.104.255.095	1.104.235.095	99,94	100
<b>2</b>	<b>Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>5.825.885.936</b>	<b>5.724.224.518</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	538.750.000	530.462.185	98,46	100
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	235.900.000	234.762.500	99,52	100
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya	574.700.000	568.115.000	98,85	100
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya	338.832.936	307.082.500	90,63	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.137.703.000	4.083.802.333	98,70	100

Bila dilihat dari tabel laporan realisasi keuangan, berikut penjelasan realisasi kegiatan yang terkait dengan **Perjanjian Kinerja Tahun 2023** yaitu :

Terdiri dari 5 kegiatan yang menunjang capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan masing-masing realisasi keuangan yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur Dan Masyarakat dengan realisasi sebesar 98,46%,
- b. Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur Dan Masyarakat dengan realisasi sebesar 99,52%,
- c. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Budaya dengan realisasi sebesar 98,85%,

- d. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Budaya dengan realisasi sebesar 90,63%
- e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung dengan realisasi sebesar 98,70%.

Kegiatan Point a dan b ikut menunjang target indikator *Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh*, kegiatan point c dan d menunjang kegiatan *promosi dan pameran Seni Budaya Aceh yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek*, sedangkan point e Kegiatan yang menunjang *pengakses data dan informasi pada website BPPA*.

## **BAB IV PENUTUPAN**

### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan hasil realisasi *Laporan Kinerja* sebesar **100%** dari target Penetapan Kinerja tahun 2023. Program dan Indikator Kinerja yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk realisasi keuangan secara umum meningkat dari tahun sebelumnya yaitu **99,62%**. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif Pemerintah dan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

### **B. Saran**

1. Masih perlu lebih banyak dukungan untuk peningkatan sarana dan prasarana bagi BPPA untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal demi tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RPJM.
2. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

## LAMPIRAN I

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN/ REALISASI (%)
1	2	3	4		5		6
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	75	%	75	%	100%

Total keseluruhan capaian Penetapan Kinerja tahun anggaran 2023 rata-rata **100%**

## LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA 2023

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	75 %

Program

1 Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Anggaran

Rp 5.724.224.518,-

Banda Aceh, 2023

Pj. GUBERNUR ACEH,

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PEMERINTAH ACEH,



ACHMAD MARZUKI



AKKAR ARAFAT, S.STP. M.Si